

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Program MCP telah berjalan dengan baik dan layak untuk dilanjutkan. Program ini telah memberikan dampak signifikan terhadap meningkatnya kualitas tata kelola dan pelayanan publik, meningkatnya penerimaan daerah, serta meningkatnya jumlah aset daerah yang terkelola dan tersertifikasi. Kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja *Public Impact Fundamental (PIF)*. Berikut ini merupakan deskripsi dari hasil evaluasi tersebut:

Pada dimensi legitimasi (*legitimacy*): (1) Aspek kepercayaan publik, menunjukkan bahwa KPK memiliki kepercayaan publik yang relatif baik, dan Program MCP memperoleh dukungan dari pemerintah daerah; (2) Aspek keterlibatan pemangku kepentingan, menunjukkan bahwa KPK telah melibatkan banyak pemangku kepentingan yang relevan dalam pelaksanaan Program MCP; (3) Aspek komitmen politik, menunjukkan bahwa KPK dan Pemangku Kepentingan memiliki komitmen politik dalam pencegahan korupsi.

Pada dimensi kebijakan (*policy*): (1) Aspek kejelasan tujuan, menunjukkan bahwa Program MCP memiliki tujuan yang jelas yang telah ditetapkan dalam dokumen kebijakan, dan tujuan tersebut mampu menjawab persoalan yang dihadapi; (2) Aspek Indikator bukti, menunjukkan bahwa Program MCP menggunakan bukti yang relevan dan kredibel dalam proses formulasi program tersebut, dan adanya uji coba terhadap program sebelum diluncurkan; (3) Aspek kelayakan, menunjukkan bahwa Program MCP di desain dengan mempertimbangkan kelayakan karena terdapat dasar hukum dan kerangka regulasi yang jelas, adanya dukungan anggaran yang cukup memadai, namun kurang didukung sumber daya manusia yang memadai, adanya kerangka waktu implementasi yang jelas.

Pada dimensi tindakan (*action*): (1) Aspek pengelolaan, menunjukkan bahwa Program MCP dikelola dengan baik, hal ini karena adanya kejelasan penanggung jawab, adanya penempatan orang yang sesuai dengan keahlian, adanya proses implementasi yang jelas, serta adanya panduan operasional pelaksanaan program; (2) Aspek pengukuran, menunjukkan bahwa Program MCP diukur dengan baik, hal ini karena adanya sistem pengumpulan dan pengolahan data yang terintegrasi sehingga membuat proses kerja menjadi efektif dan efisien, adanya seperangkat indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program, dan adanya penginformasian terhadap hasil dan dampak program secara periodik; (3) Aspek penyesuaian, menunjukkan bahwa Program MCP memiliki keselarasan yang baik, hal ini karena tidak ada perbedaan kepentingan yang signifikan di antara para aktor yang terlibat, adanya kerjasama yang efektif dan sinergis antar pemangku kepentingan, serta adanya mekanisme insentif bagi pemda.

Dalam pelaksanaannya Program MCP tidak terlepas dari berbagai hambatan. Pada aspek internal, KPK menghadapi hambatan minimnya sumber daya manusia, hambatan kondisi geografis daerah, hambatan kelengkapan dokumen laporan. Pada aspek eksternal, pemda menghadapi hambatan yang lebih kompleks seperti, komitmen politik kepala daerah yang rendah, rentan adanya politisasi, minimnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia, minimnya anggaran, kendala infrastruktur teknologi, kendala geografis, serta kendala perbedaan persepsi terhadap dokumen yang dibutuhkan untuk memenuhi pelaporan.

Meski belum mampu mereduksi praktik korupsi yang masih masif di daerah, adanya Program MCP membuat pelaksanaan rencana aksi di daerah dapat dimonitoring dan nilai secara berkala, sehingga akan dapat terpetakan pemerintah daerah mana yang memiliki komitmen terhadap pencegahan korupsi mana yang tidak. Dari pemetaan tersebut akan memudahkan KPK untuk memfokuskan pendampingan pada daerah-daerah yang tata kelolanya masih buruk, sehingga perbaikan bisa lebih fokus dan terarah. Dalam jangka panjang, upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah daerah sehingga dapat mencegah atau meminimalisir praktik korupsi di daerah secara signifikan.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk perbaikan Program MCP. Beberapa saran tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) bagian berdasarkan institusi yang memiliki peran dan terkait dengan pencegahan korupsi di daerah:

Saran untuk KPK: (1) KPK perlu memperbaiki kinerja dan kondusifitas internal organisasi agar kepercayaan publik kembali pulih; (2) KPK perlu meningkatkan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang ada di Kedeputan Korsup agar fungsi Koordinasi Supervisi Pencegahan di daerah dapat dilaksanakan secara optimal; (3) KPK perlu memperbaiki dan mempertajam indikator dan sub-indikator Program MCP dari waktu-ke-waktu dengan mempertimbangan kondisi di daerah; (4) KPK perlu membuat lebih banyak kegiatan pencegahan korupsi tematik di daerah atau bidang tertentu yang termasuk dalam area rawan korupsi; (5) KPK perlu melibatkan masyarakat sipil, komunitas akademik, dan pengusaha dalam memantau pelaksanaan Program MCP; (6) KPK perlu mendorong kepala daerah agar lebih berkomitmen dalam pencegahan korupsi di daerahnya; (7) KPK perlu mendorong peningkatan alokasi insentif kepada pemerintah daerah yang berkomitmen nyata dalam pencegahan korupsi;

Saran untuk Pemerintah Daerah: 1) Pemerintah daerah perlu menunjukkan komitmen anti-korupsi secara nyata dengan menjalankan rencana aksi pencegahan korupsi, dan rekomendasi-rekomendasi KPK secara konsekuen; dan 2) Pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan secara mandiri terhadap area rawan korupsi yang ada di daerahnya.

Saran untuk Pemerintah Pusat dan DPR: (1) Pemerintah Pusat dan DPR perlu menunjukkan sikap *zero tolerance* terhadap korupsi; (2) Pemerintah Pusat dan DPR perlu mempertimbangkan opsi agar KPK dapat mendirikan kantor perwakilan di daerah untuk mengoptimalkan fungsi Koordinasi dan Supervisi terhadap Pemerintah Daerah; dan (3) Pemerintah Pusat dan DPR perlu memprioritaskan kebijakan yang memperkuat upaya pemberantasan korupsi dengan pengundangan RUU Perampasan Aset, RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, dan Revisi UU Tindak Pidana Korupsi.